



KKP
2025
#RISETOGETHER

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP



TAHUN 2025



LOTHARIA LATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap kepada instansi terkait dan publik sebagaimana berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara aktif mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berfokus pada transformasi tata kelola perikanan berbasis keberlanjutan sumber daya alam, sesuai dengan potensi

sumber daya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Program ini merupakan kontribusi nyata mewujudkan Asta Cita, yakni kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan nasional (swasembada pangan).

Kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan berbagai instansi, pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara modern, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kami mengharapkan tanggapan maupun saran yang membangun. Semoga melalui Laporan Kinerja ini, peran strategis seluruh jajaran serta pemangku kepentingan semakin meningkat untuk dapat mendukung kinerja pembangunan perikanan tangkap di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 10 Februari 2026

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Lotharia Latif

RINGKASAN EKSEKUTIF

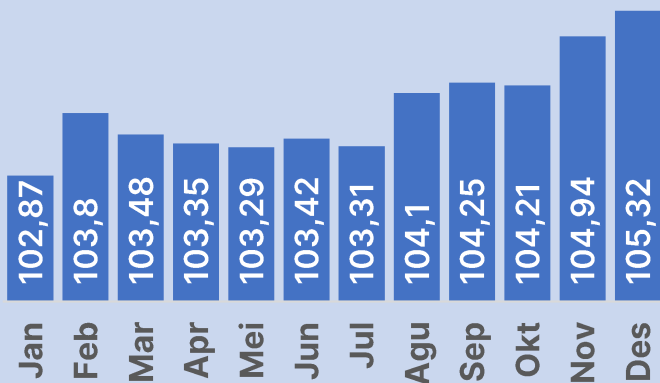
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2025 DJPT menetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 5 (lima) Indikator Kinerja tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan triwulan IV atau akhir tahun 2025, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>), capaian Skor Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial pada tahun 2025 adalah 108,39 atau masuk dalam kriteria Baik. Sebagian besar indikator kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan

Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan hingga akhir tahun 2025, DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.824.098.491.423 atau 71,21% dari pagu sebesar Rp2.561.432.513.000. Dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada periode mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

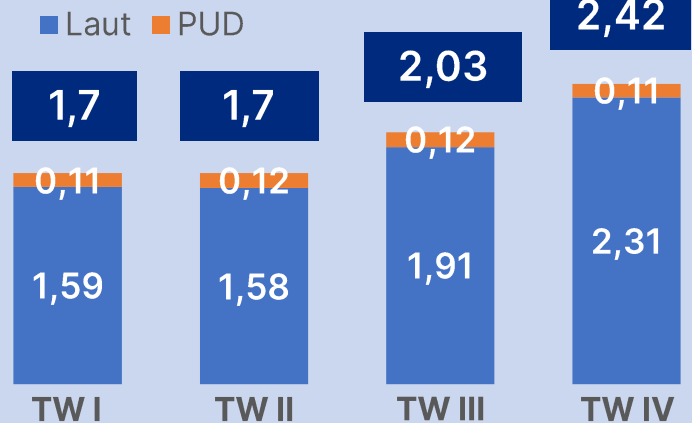


CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025



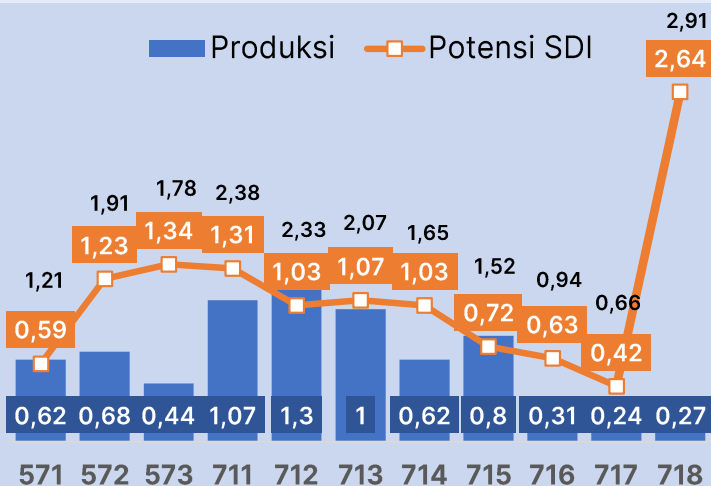
Nilai Tukar Nelayan 103,86 (indeks)

I_b : 121,37
 I_t : 126,06



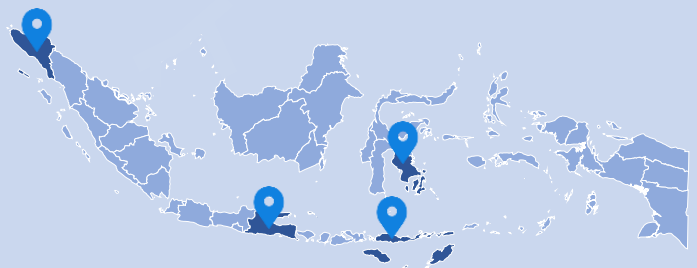
Produksi Perikanan Tangkap 7,85 Juta Ton

Laut : 7,38 Juta Ton
PUD : 0,47 Juta Ton



Proporsi Tangkapan Jenis Ikan 61,19 (persen)

Berada dalam Batasan biologis yang aman



Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Nelayan 4 Lokasi

- KDMP Syariah Gampong Kuala Raja, Bireuen, Aceh
- KDMP Warloka, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
- KDMP Sorue Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara
- KDMP Lateng, Banyuwangi, Jawa Timur

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi

88,60



Persentase Pemanfaatan
Rekomendasi Pengawasan

87,81



Batas Tertinggi Nilai Temuan
BPK RI atas LK

100



Nilai PM SAKIP

89,19



Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

85,50



Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran

85,83



Nilai Maturitas Struktur dan
Proses SPIP

4,02

88,04

Indeks Profesionalitas ASN



96,20

Nilai Pengawasan Kearsipan
Internal



100

Persentase Pengadaan PBJ
yang diumumkan di SIRUP



81,18

Nilai Pembangunan Integritas



100

Persentase Penyelesaian
Regulasi



65,00

Persentase Penyelesaian Proses
Bisnis Lvl 2 & 3 dan SOP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
INFOGRAFIS	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA	3
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	5
2.2 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	6
2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan	15
Sasaran Program (SP-2): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	20
Sasaran Program (SP-3): Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	25
Sasaran Program (SP-4): Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan	27

<i>Sasaran Program (SP-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap</i>	31
3.3 KINERJA ANGGARAN	33
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	36
BAB 4 PENUTUP	39
LAMPIRAN	41
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	42
Data Nilai Tukar Nelayan Tahun 2025	45
Data Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Nelayan	46

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	9
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025	14
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2025	15
4	Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)” Tahun 2025	21
5	Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2025	25
6	Perbandingan capaian tahun 2025 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya	25
7	Capaian IKU “Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan” Tahun 2025	29
8	Capaian IKU “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2025	31
9	Indikator Komposit dan Capaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT	32
10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kegiatan	34
11	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	34
12	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	35
13	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan	35
14	Efisiensi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Program	37

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025	3
2	<i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerjaku DJPT Tahun 2025	14
3	Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2025	16
4	Grafik Pergerakan It dan Ib untuk tahun 2024 dan 2025	16
5	Grafik Gap Pergerakan It dan Ib untuk 2024 dan 2025	17
6	Tabel Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Komponen Pembentuknya Tahun 2025	17
7	Grafik perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NT Petani) Tahun 2025	18
8	Target NTN periode 2020-2024 dan 2025-2029 serta Realisasi Capaian	19
9	Grafik Volume Produksi dan Potensi per WPPNRI	21
10	Grafik Data Kapal dan Jumlah Trip Logbook Penangkapan Ikan Tahun 2025	22
11	Grafik sebaran penempatan Observer per Hari Layar Tahun 2025	23
12	Target Proporsi periode 2020-2024 dan 2025-2029 serta Realisasi Capaian	23
13	Target Volume periode 2020-2024 dan 2025-2029 serta Realisasi Capaian	26
14	Infografis Ringkasan Pembangunan KNMP Tahun 2025	28
15	Sinergi Program KNMP dengan KDMP	29
16	Proses Bisnis dan Model Kemitraan di 4 Lokasi Koperasi Desa Merah Putih	30
17	Grafik Perbandingan Capaian Nilai Implementasi RB lingkup KKP	32

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah serta menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi ini menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan serta optimalisasi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan pendekatan ekonomi biru (*blue economy*). Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan unit kerja di lingkungan KKP yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) KKP. Berkaitan dengan program ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP, DJPT mengampu salah satu program prioritas yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem dan sumber daya ikan serta sekaligus mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan dengan cara optimalisasi potensi perikanan nasional dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Kebijakan PIT juga merupakan suatu langkah nyata dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis maritim sebagaimana tertuang pada agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Selain dukungan terhadap program prioritas KKP, DJPT terus melaksanakan program strategis lainnya dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan infrastruktur industri perikanan tangkap, produktivitas nelayan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja publik, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara berkala. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan serta merupakan instrumen evaluatif untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program di masa yang akan datang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan

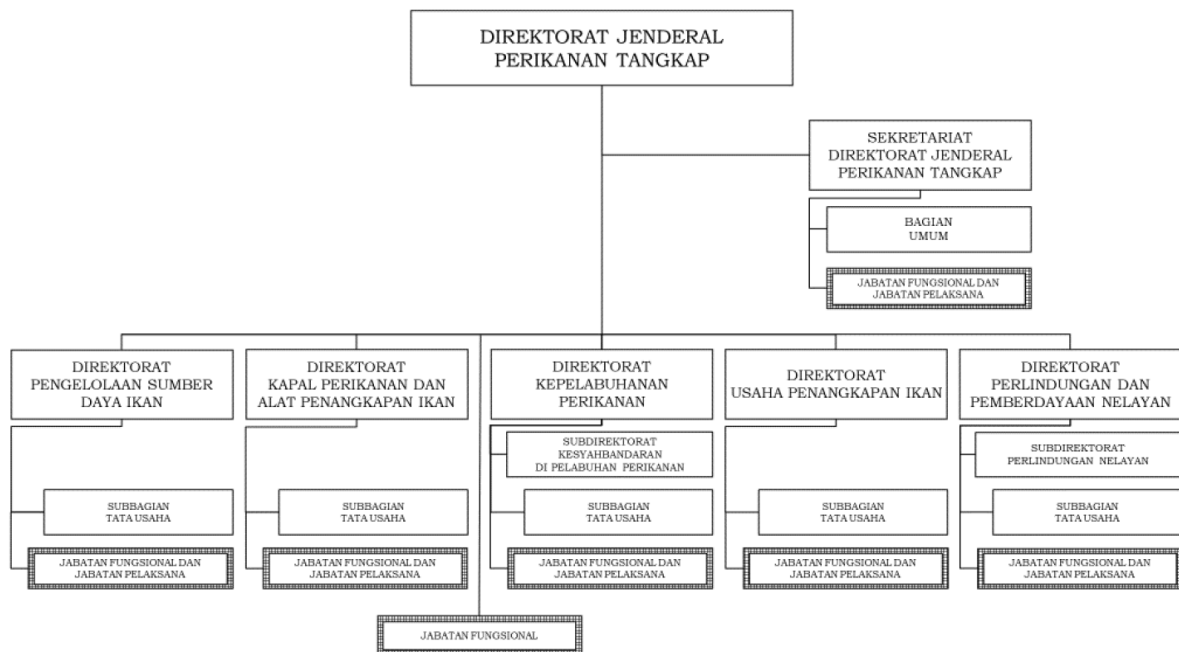
ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan; dan
6. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tergambar pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada periode mendatang.

b. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode tertentu.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan Tangkap dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
 - a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.

3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah **“Kesejahteraan Nelayan Meningkat”**, dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan;
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan”**, dengan indikator kinerja: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan.
5. Sasaran program keempat (SP-5) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap”**, dengan indikator kinerja: Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025, secara rinci sebagai berikut:



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105
2.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	2	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen)	≤ 80
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	3	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan	4	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)	4
5.	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Pengelolaan Perikanan Tangkap	5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.199.478.353.000
	a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	
	b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
	c. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
	d. Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
2.	Program Dukungan Manajemen	439.139.099.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025		2.638.617.452.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
		Pelaksanaan penataan kampung nelayan (Kalaju)
		Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)
		identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya
		koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan
2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	Reviu kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan
		Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan
		Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan
		Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan
		Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan
		Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Evaluasi pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan
		Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan
		Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dilakukan pengendalian pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar
		Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar
		Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan
		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
		Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
		Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya
		Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT
		Penyiapan Tenaga Pendataan dan penugasan dalam menunjang pelaksanaan PNBK pasca produksi
		Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBK pasca produksi
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan
		Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan
		Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
		Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBK pascaproduksi
		Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
		Penerbitan izin usaha penangkapan ikan
		Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah
		Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)
		Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan Optimalisasi Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis Sesuai Standar Optimalisasi Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis Sesuai Standar Penguatan Sistem Pendataan Pelabuhan Perikanan untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan Fasilitasi Tata Kelola Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kepatuhan
3	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen)	Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Inisiasi dan koordinasi pembentukan lembaga penetapan lembaga pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan

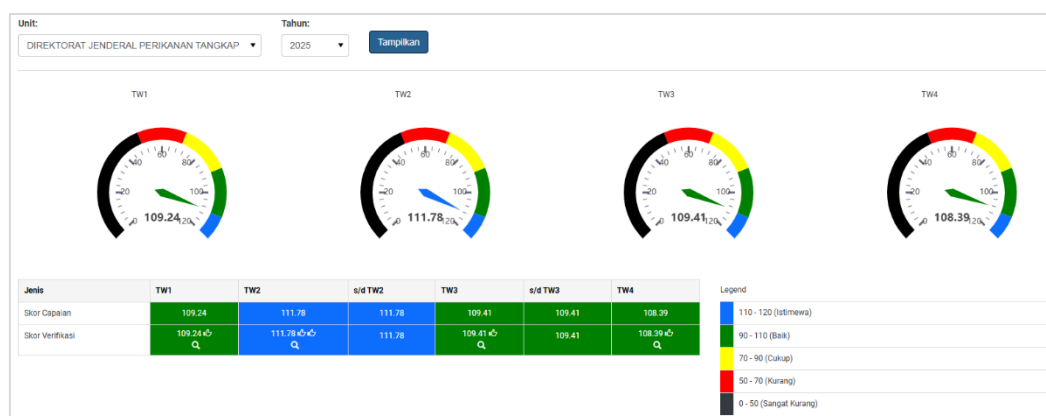
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur Operasionalisasi LPPWPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan Penguatan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat untuk Kelestarian dan Optimalisasi Sumber Daya Ikan
4	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)	Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan
5	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	Penyusunan program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran Penyusunan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sub bidang Perikanan Tangkap serta koordinasi lintas sektor Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP Ketatalaksanaan Organisasi Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
		Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
		Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
		Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
		Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
		Pendampingan Hukum
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
		Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan
		Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
		Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
		Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas
		Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Tahun 2025

Capaian kinerja DJPT pada tahun 2025 mendapat predikat “Baik”, hal ini ditandai dengan nilai capaian Kinerja IKU sebesar 108,39. Meskipun demikian, masih terdapat IKU yang belum mencapai target, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian 103,86 (98,91%). Capaian NTN 2025 mengalami peningkatan 2,06% jika dibandingkan dengan capaian NTN 2024 sebesar 101,76, namun pada sisi pengeluaran nelayan masih secara signifikan menahan kenaikan NTN sehingga masih belum dapat mencapai target 2025 sebesar 105.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sampai dengan akhir tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105	103,89	98,91
2	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	2	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen)	≤ 80	61,19	123,51
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	3	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19	7,85	126,82
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan	4	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)	4	4	100
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap	5	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	88,60	103,02

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Program-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran program ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap. Adapun persentase capaian Sasaran Program dengan Indikator Kinerja berupa NTN sebesar 98,91%, yang menunjukkan bahwa indikator yang telah ditetapkan sebagai alat untuk mengukur capaian sasaran program belum mencapai target, sehingga kedepannya perlu dilakukan 1) inovasi teknologi penangkapan, 2) percepatan penyaluran bantuan dan distribusi yang lebih luas dan merata, serta 3) peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan agar produktivitas meningkat.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

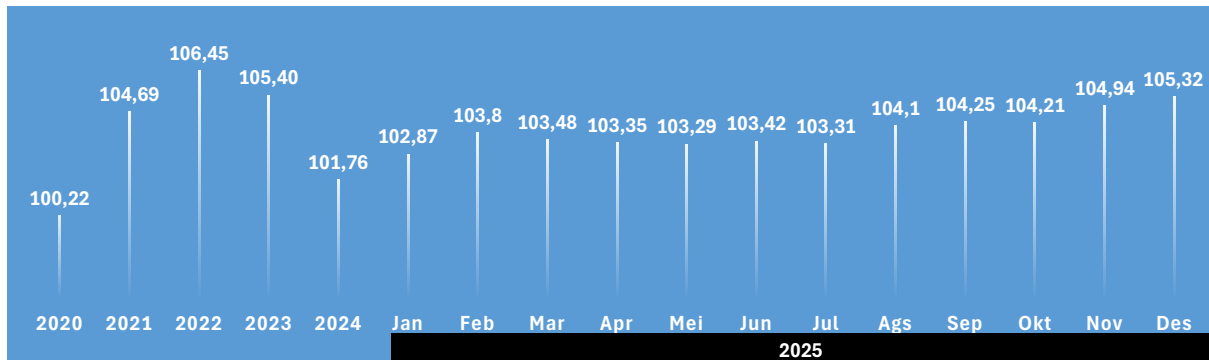
Target Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam Renstra KKP Tahun 2025-2029 ditetapkan dalam bentuk rentang nilai 105-108 untuk 2025, sesuai dengan kebijakan perencanaan oleh Bappenas dengan mempertimbangkan karakteristik NTN yang dipengaruhi faktor fluktuasi harga hasil tangkapan, biaya operasional, kondisi cuaca, serta ketidakpastian dinamika ekonomi. Dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025, target NTN ditetapkan berupa angka tunggal sebesar 105, untuk menjamin kejelasan sasaran, kemudahan pengukuran, dan konsistensi evaluasi kinerja, mengingat aplikasi pengukuran kinerja KKP (Kinerjaku) belum dapat mengakomodasi target dalam bentuk rentang nilai. Penetapan angka tersebut merupakan pengambilan batas bawah dari target Renstra KKP dan tidak mengubah arah kebijakan maupun sasaran program Kesejahteraan Nelayan Meningkat, melainkan bertujuan menjaga keselarasan antara perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Tahun 2025

SP 1		Kesejahteraan Nelayan Meningkat							
IKU 1		Nilai Tukar Nelayan (NTN)							
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra KKP	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Akhir Renstra
100,22	104,69	106,45	105,40	101,76	105	103,86	98,91	109	95,28

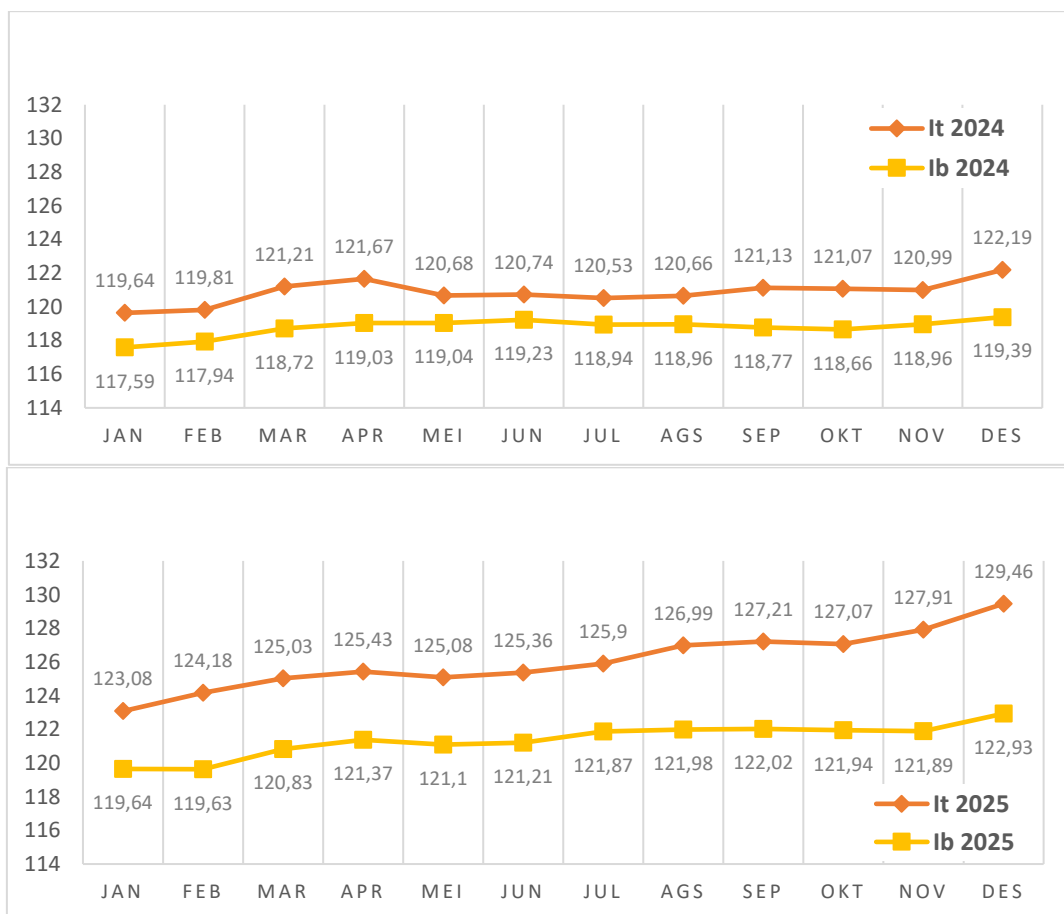
Realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama 6 tahun terakhir (2020 s.d. 2025) dengan pendekatan tahun dasar yang sama menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang dinamis. Pada tahun 2020, nilai NTN mencapai 100,22. Lalu, terjadi kenaikan pada tahun 2021 (104,69) dan 2022 (106,45), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 (105,40) dan 2024

(101,76). Nilai NTN pada tahun 2025 kembali menunjukkan nilai yang positif dimana nilai NTN naik menjadi 103,86 atau mengalami peningkatan sebesar 2,06% jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2024.

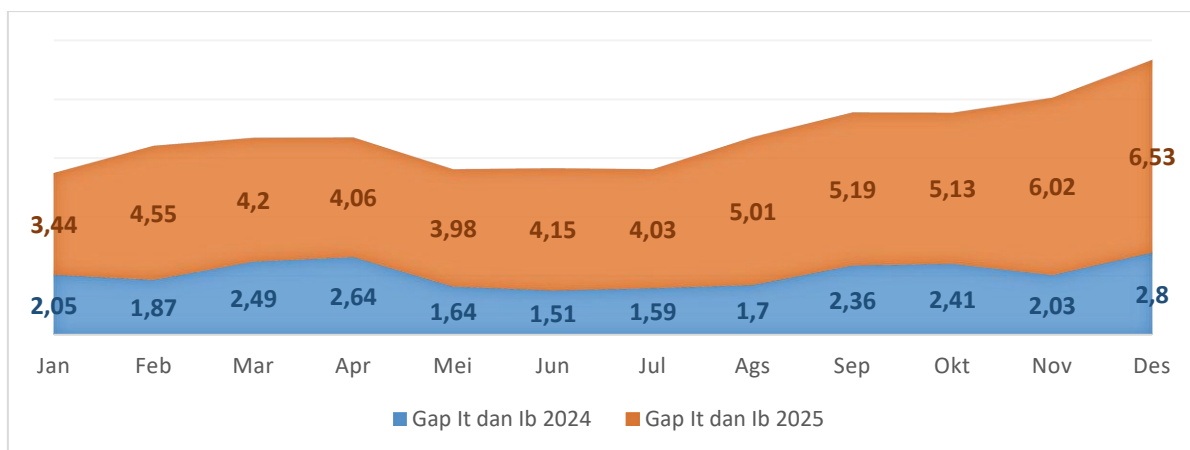


Gambar 3. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2025, fluktuasi NTN dapat dilihat dari pergerakan bulanan. Selama tahun 2025, pertumbuhan NTN nasional mengalami tren kenaikan sebesar 2,47. Nilai NTN tertinggi tercatat pada bulan Desember 2025 sebesar 105,32. Sedangkan nilai terendah terjadi pada awal tahun yaitu pada bulan Januari 2025 sebesar 102,87. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,1. Jika dibandingkan dengan target NTN tahun 2025 sebesar 105, posisi capaian tahun 2025 sudah mencapai 98,91%. Jika ditinjau berdasarkan wilayah administratif, NTN tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian sebesar 118,83 dan NTN terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian sebesar 91,81.



Gambar 4. Grafik Pergerakan It dan Ib untuk tahun 2024 dan 2025



Gambar 5. Grafik Gap Pergerakan I_t dan I_b untuk 2024 dan 2025

Berdasarkan grafik di atas (Gambar 4), terlihat bahwa nilai Indeks Harga yang Diterima (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar (I_b) pada tahun 2025 secara nominal lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Selain itu, gap atau selisih antara I_t terhadap I_b pada tahun 2025 (Gambar 5) terlihat semakin melebar dibandingkan tahun 2024. Kondisi tersebut berdampak pada capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2025 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Lebih lanjut, kenaikan NTN selama tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,1 dibandingkan pada 2024 yang mengalami penurunan sebesar 3,64.

Indikator	2025												Tahunan
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	123,08	124,18	125,03	125,43	125,08	125,36	125,9	126,99	127,21	127,07	127,91	129,46	126,06
Penangkapan Perairan Umum	119,58	119,85	120,32	120,72	120,45	120,13	120,15	120,22	119,81	120,22	120,93	122,2	120,38
Penangkapan Laut	123,13	124,21	125,08	125,47	125,16	125,58	126,17	127,32	127,48	127,33	128,21	129,74	126,24
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	119,64	119,63	120,83	121,37	121,1	121,21	121,87	121,98	122,02	121,94	121,89	122,93	121,37
Konsumsi Rumah Tangga	123,13	122,78	124,77	125,82	125,3	125,59	126,56	126,63	126,62	126,51	126,36	128,05	125,68
Makanan, Minuman Dan Tembakau	128,96	128,77	130,36	131,14	130,24	130,67	132,04	132,15	132,04	131,75	131,43	133,9	110,97
Pakaian Dan Alas Kaki	120,29	120,45	121,86	122,04	122,12	122,33	122,65	122,72	122,8	122,9	122,98	123,22	122,20
Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	96,72	92,21	103,5	110,66	110,69	110,71	110,8	110,88	110,89	110,9	110,91	111,06	107,49
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	118,07	118,26	118,64	118,81	118,97	119,1	119,25	119,37	119,52	119,67	119,85	119,96	119,12
Kesehatan	116,63	116,83	117,34	117,52	117,78	117,93	118,09	118,21	118,31	118,45	118,59	118,71	117,87
Transportasi	120,26	120,72	120,89	120,72	120,72	120,52	120,99	120,62	120,77	120,84	120,96	121,95	120,83
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	103,64	103,65	103,68	102,81	102,79	102,84	102,84	102,87	102,9	102,92	102,92	102,92	103,07
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	115,19	115,27	115,56	115,78	115,98	116,24	116,98	117,2	117,32	117,37	117,39	117,47	116,48
Pendidikan	104,54	104,59	104,6	104,6	104,6	104,54	104,76	104,94	104,95	104,96	104,96	104,96	104,75
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	114,45	114,6	114,88	115,04	115,26	115,38	115,61	115,8	116	116,16	116,32	116,46	115,50
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	121,68	122,41	123,32	124,5	124,9	125,23	125,52	125,84	126,56	128,11	128,8	129,33	125,52
BPPBM	115,87	116,18	116,46	116,41	116,41	116,38	116,59	116,73	116,84	116,82	116,96	117,28	116,58
Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	112,5	112,68	113,17	113,42	113,5	113,64	113,88	114,03	114,11	114,23	114,38	114,56	113,68
Transportasi Dan Komunikasi	121,19	121,74	121,82	121,42	121,27	121,01	121,37	121,51	121,57	121,53	121,67	122,32	121,54
Barang Modal	110,99	111,11	111,5	111,6	111,67	111,77	111,84	111,95	112,06	112,12	112,22	112,3	111,76
Upah Buruh	112,56	112,71	112,98	113,2	113,26	113,3	113,36	113,54	113,63	113,63	113,72	113,81	113,31
NILAI TUKAR NELAYAN	102,87	103,8	103,48	103,35	103,29	103,42	103,31	104,1	104,25	104,21	104,94	105,32	102,86

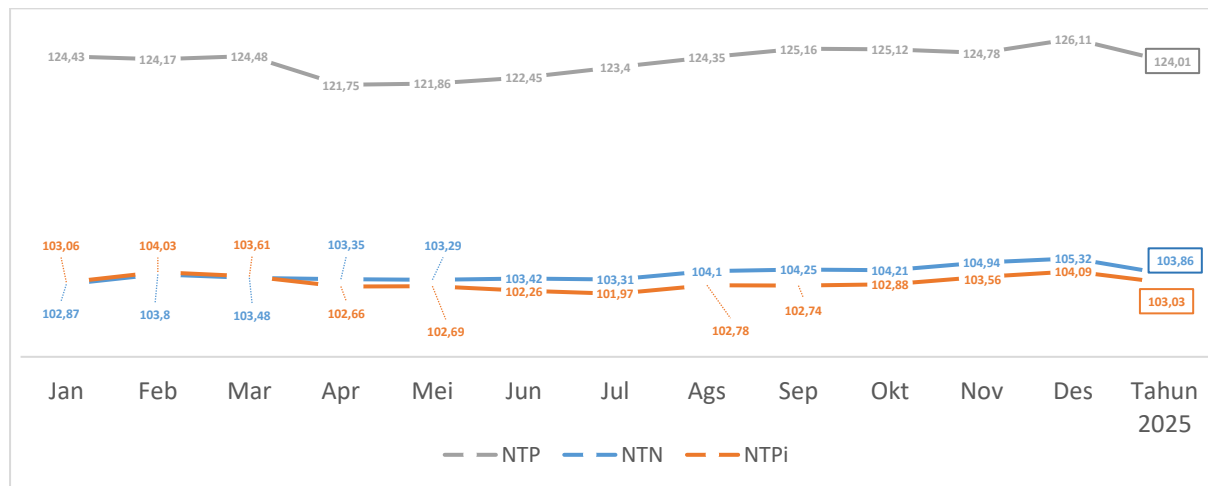
Gambar 6. Tabel Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Komponen Pembentuknya Tahun 2025

Berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan capaian NTN tahun 2025 didorong oleh perbaikan harga jual hasil tangkapan. Indeks Harga yang Diterima (I_t) mencapai 126,06, lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar (I_b) sebesar 121,37. Kenaikan pendapatan nelayan (I_t) disumbang secara dominan oleh subsektor penangkapan laut (126,24), sementara perikanan tangkap di perairan umum masih relatif lebih rendah (120,38).

Pada sisi biaya hidup nelayan (Konsumsi Rumah Tangga), terlihat masih relatif tinggi berdasarkan perhitungan I_b dengan nilai rata-rata tahun 2025 sebesar 125,68. Adapun komponen utama yang menekan daya beli, yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau (131,12), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (125,52), serta Transportasi (120,83). Hal ini mengindikasikan harga kebutuhan pokok dan transportasi ini memperkecil daya beli nelayan. Kemudian beban biaya produksi usaha penangkapan juga masih meningkat, di mana Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) pada tahun 2025 mencapai 116,58 atau meningkat sebesar 1,14 persen dibandingkan tahun 2024. Kenaikan tersebut terjadi pada Sewa dan Pengeluaran Lainnya sebesar 113,68, Transportasi dan Komunikasi sebesar 121,54, Barang Modal sebesar 111,76, serta Upah Buruh sebesar 113,31. Hal ini

menunjukkan bahwa biaya operasional usaha penangkapan ikan, khususnya yang berkaitan dengan energi dan logistik, masih cukup tinggi.

Di luar faktor biaya, produktivitas tangkapan nelayan juga belum optimal akibat pembatasan operasi yang dipengaruhi oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi, keterbatasan akses BBM bersubsidi, serta belum meratanya infrastruktur rantai dingin. Secara keseluruhan, meskipun terjadi perbaikan pada sisi harga hasil tangkapan, peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi tekanan biaya hidup dan biaya produksi yang masih tinggi. Ketidakseimbangan antara kenaikan pendapatan dan beban pengeluaran inilah yang menjadi faktor penyebab NTN tahun 2025 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.



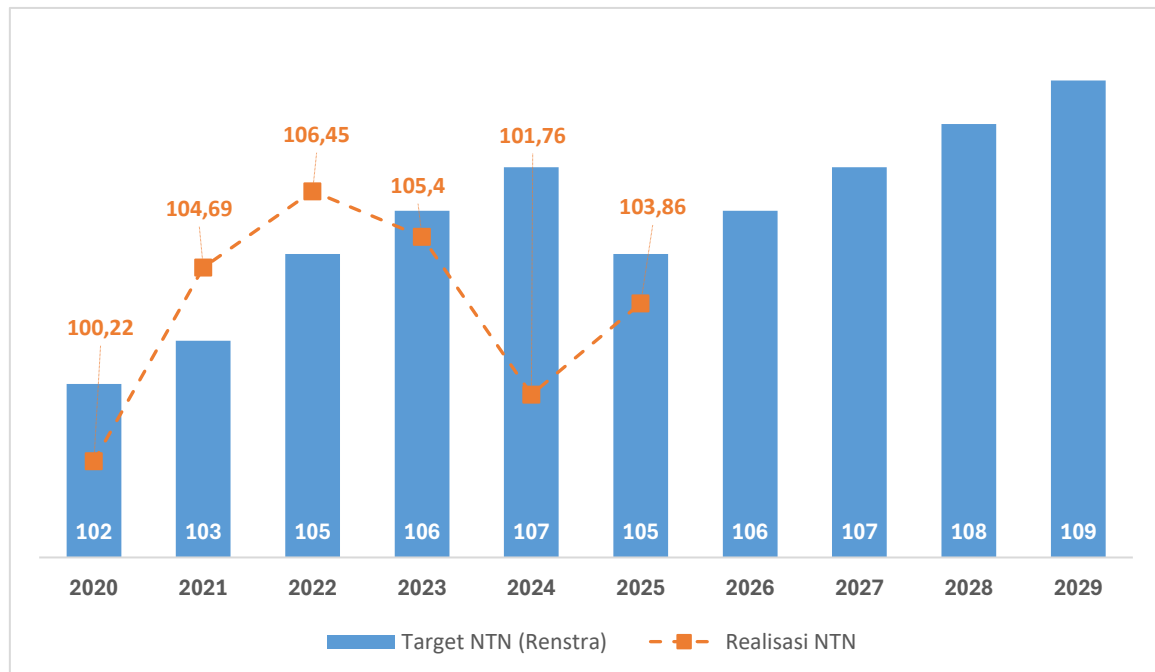
Gambar 7. Grafik perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2025

Gambar diatas memperlihatkan perbandingan capaian realisasi NTN terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2025. Dibandingkan dengan NTP, capaian NTN masih lebih rendah, menunjukkan bahwa daya beli nelayan belum sekuat petani di luar subsektor perikanan, terutama akibat struktur biaya operasional dan konsumsi yang relatif lebih tinggi. Namun jika dibandingkan dengan NTPi, capaian NTN relatif lebih baik, yang mengindikasikan bahwa tekanan biaya yang dihadapi nelayan cenderung lebih kecil dibanding pembudidaya ikan. Posisi NTN yang masih berada di bawah NTP menunjukkan perlunya penguatan kebijakan peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya nelayan agar kesenjangan kesejahteraan antar subsektor dapat diperkecil.

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung, seperti:

- memperluas ruang lingkup calon penerima BBM subsidi melalui percepatan pendataan nelayan dengan kartu KUSUKA, berkoordinasi dengan BPPSDMKP, serta berbagai upaya untuk penyederhanaan persyaratan penerima BBM subsidi dan digitalisasi distribusi BBM Nelayan;
- percepatan penerbitan rekomendasi pembangunan SPBUN, termasuk berbagai koordinasi dan pembahasan penyederhanaan prosedur permohonan rekomendasi bersama pihak PT. Pertamina Patra Niaga;
- pemenuhan kepatuhan usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan produksi nelayan melalui pelaksanaan gerai perizinan berusaha di berbagai daerah;
- penyaluran bantuan berupa alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, dan kapal perikanan kepada nelayan;

- e. upgrading kapasitas dan pemberdayaan nelayan seperti fasilitasi perjanjian kerja laut, jaminan sosial ketenagakerjaan, diversifikasi usaha nelayan, dan pendanaan usaha nelayan; dan
- f. pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebanyak 100 lokasi di tahun 2025. Diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan di periode selanjutnya.



Gambar 8. Target NTN periode 2020-2024 dan 2025-2029 serta Realisasi Capaian

Berdasarkan evaluasi capaian selama periode renstra 2020-2024, NTN memperlihatkan hasil yang berfluktuasi dan belum sepenuhnya konsisten mencapai target yang ditetapkan. Pada 2020, capaian NTN sebesar 100,22 berada di bawah target 102, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas penangkapan dan pemasaran hasil perikanan akibat pandemi. Capaian mulai membaik pada 2021 (104,69) dan 2022 (106,45) dan berhasil melampaui target tahunan, menunjukkan adanya peningkatan usaha perikanan tangkap yang diiringi upaya dukungan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam pemulihan pascapandemi. Namun pada 2023 capaian NTN mengalami penurunan dan belum dapat mencapai target. Begitu pula pada tahun 2024, terjadi penurunan cukup signifikan dengan capaian 101,76, jauh di bawah target 107, yang mencerminkan meningkatnya beban biaya operasional dan konsumsi nelayan yang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan hasil tangkapan.

Hasil evaluasi di atas menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target NTN pada periode Renstra 2025-2029 sehingga dapat lebih realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ditjen Perikanan Tangkap telah berupaya untuk mengusulkan penyesuaian target NTN sesuai dengan penyampaian Nota Dinas Nomor 1385/DJPT.1/RC.420/VI/2024 kepada Biro Perencanaan KKP pada tahun 2024, namun hasil pertimbangan bersama Bappenas menyatakan bahwa target tidak dapat diturunkan karena berdasarkan capaian tahun 2023 yang dijadikan baseline sebesar 105,40 serta alokasi anggaran dan rencana kegiatan tahun 2025 sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran maka diasumsikan target tahun 2025 dapat tercapai. Target NTN tahun 2025 ditetapkan sebesar 105 sebagai upaya pemulihan capaian pascapenurunan capaian kinerja tahun sebelumnya, sekaligus mempertimbangkan keterbatasan penganggaran dan tantangan operasional nelayan. Selanjutnya, target NTN

direncanakan meningkat secara bertahap hingga mencapai 109 pada tahun 2029, dengan memperhatikan penguatan program peningkatan pendapatan nelayan dan upaya pengendalian biaya operasional usaha penangkapan ikan. Penetapan target secara bertahap ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja NTN secara berkelanjutan dan lebih dapat dicapai.

Terkait peningkatan capaian NTN, beberapa upaya yang dapat dilakukan berupa penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan, disertai optimalisasi dukungan sarana dan prasarana penangkapan ikan agar kegiatan usaha nelayan berjalan lebih produktif. Selain itu, peningkatan kapasitas nelayan terus didorong melalui pembinaan dan pendampingan teknis guna memperbaiki keterampilan dan efisiensi usaha penangkapan.

3.2.2. Sasaran Program (SP-2): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Strategis-2 “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman. Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan memperhatikan laju penangkapan setiap stok ikan tidak melebihi nilai *Maximum Sustainable Yield* (MSY) di setiap unit wilayah pengelolaan perikanan. Sehingga tetap meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan guna menjaga ketahanan pangan.

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Pengelolaan perikanan mencakup seluruh upaya yang terintegrasi, termasuk proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi, serta penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan keberlanjutan produktivitas sumber daya perairan dan pencapaian tujuan yang telah disepakati. Sumber daya ikan mencakup potensi semua jenis ikan yang tersedia. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, pengambilan keputusan pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan karakteristik Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta menggunakan data statistik yang valid sebagai dasar penilaian.

Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh observer, dan penghitungan kuota sumber daya ikan. Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan logbook penangkapan ikan untuk setiap tripnya memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi atas potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Sementara pemantauan observer selama hari laut kapal perikanan, menjamin ketersediaan data yang dapat digunakan sebagai data pembanding sekaligus sarana validasi data log book penangkapan ikan dan memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penanganan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan. Perhitungan IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan

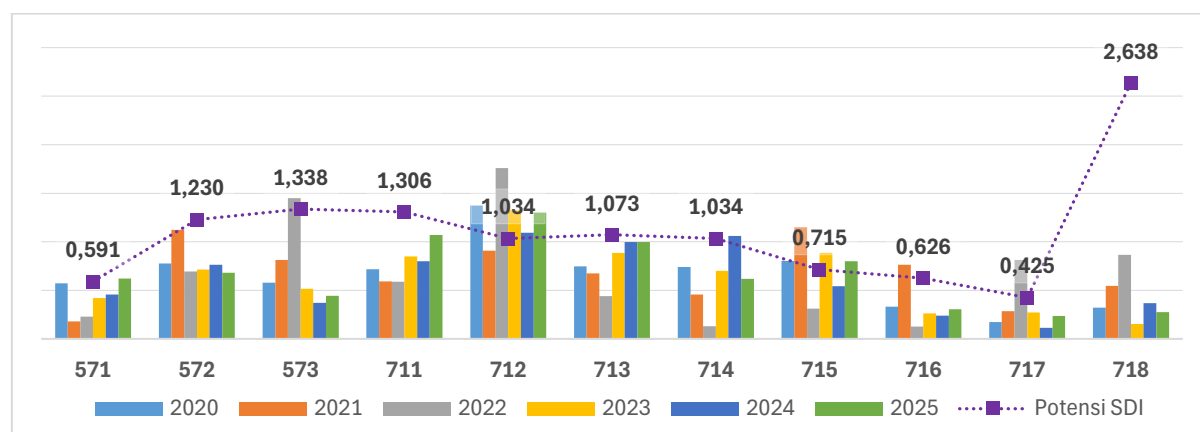
yang Berada pada Batas Biologis yang Aman” dihitung dari jumlah volume produksi perairan laut pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Tabel 4. Capaian IKU “Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)” Tahun 2025

SP 2	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan									
IKU 2	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman									
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra KKP		
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
56,91	59,73	61,71	58,18	56,7	≤ 80	61,19	123,51	≤ 80	123,51	

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Tahun 2025 tercatat sebesar 7.349.676 ton. Data produksi tersebut berasal dari olahan data pada Portal Data KKP (portaldata.kkp.go.id) yang merupakan angka sangat sementara dan belum dilakukan validasi. Adapun jumlah tersebut dihitung dari keseluruhan produksi perikanan tangkap di seluruh WPPNRI, di luar yang berasal dari Laut Lepas (Samudera Hindia). Hasil perhitungan atas IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman” menghasilkan nilai sebesar 61,19%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa proporsi tangkapan masih berada dalam batas biologis yang aman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tangkap. Dengan demikian, pengelolaan potensi sumber daya ikan perlu terus dioptimalkan secara berkelanjutan agar keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan dapat terjaga secara seimbang.

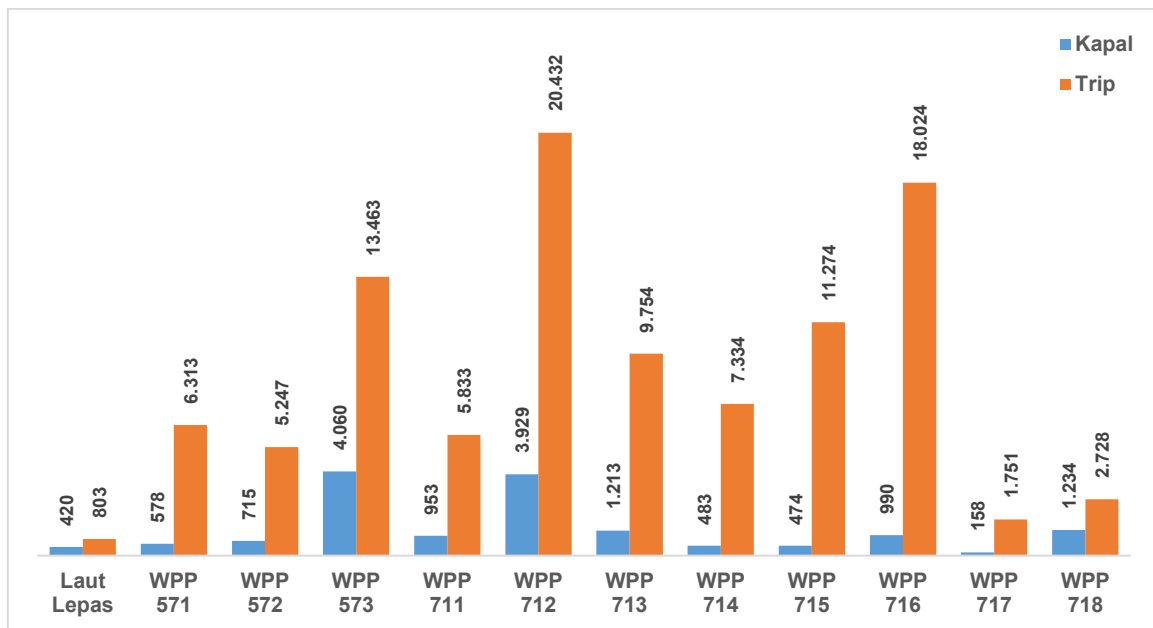
Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian indikator ini mengalami peningkatan sebesar 7,92%. Jika dilihat dari sisi ketersediaan stok sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang masih berada dalam batas Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dapat menjadi indikasi positif dalam upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Namun, pemulihan stok ikan secara alami tidak hanya ditentukan oleh jumlah tangkapan yang lebih sedikit, tetapi juga bergantung pada faktor lain seperti tingkat reproduksi ikan, kondisi habitat, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Oleh karena itu, pemantauan stok ikan yang berbasis ilmiah tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tingkat eksploitasi tidak melampaui kapasitas pemulihan ekosistem sehingga keberlanjutan sumber daya ikan dapat benar-benar terjaga.



Gambar 9. Grafik Volume Produksi dan Potensi per WPPNRI

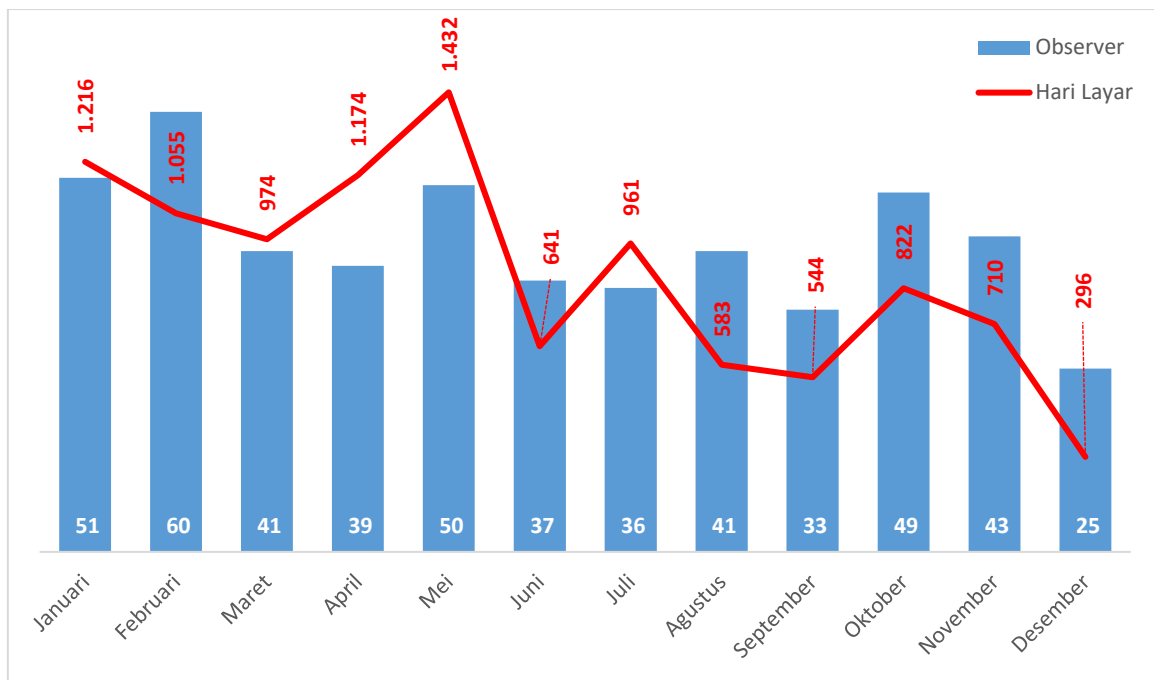
Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 WPPNRI (571, 712, dan 715) yang melampaui potensi di tahun 2025. Grafik memperlihatkan bahwa WPPNRI 711 dan WPPNRI 718 memiliki potensi sumber daya ikan yang relatif besar, sementara tingkat pemanfaatan masih belum optimal dibandingkan potensi yang ada. Kondisi ini mengindikasikan adanya peluang pengembangan usaha penangkapan ikan pada kedua wilayah pengelolaan perikanan tersebut, sepanjang dilakukan secara terukur dan berdasarkan hasil kajian stok ikan agar tidak melampaui batas biologis yang aman.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang semakin maju dan berkelanjutan, diperlukan berbagai hal seperti data statistik yang semakin akurat, operasi penangkapan ikan yang makin efisien, sarana dan prasarana perikanan tangkap yang optimal, serta harga ikan yang stabil. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan pendataan melalui kegiatan pendataan yang berbasis daerah penangkapan. Pengendalian hasil tangkapan dilakukan dengan pelaporan *log book*. Pelaporan ini dirancang secara akurat pada setiap trip di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI. Tenaga observer ditempatkan di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembandingan. *Log book* juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan.



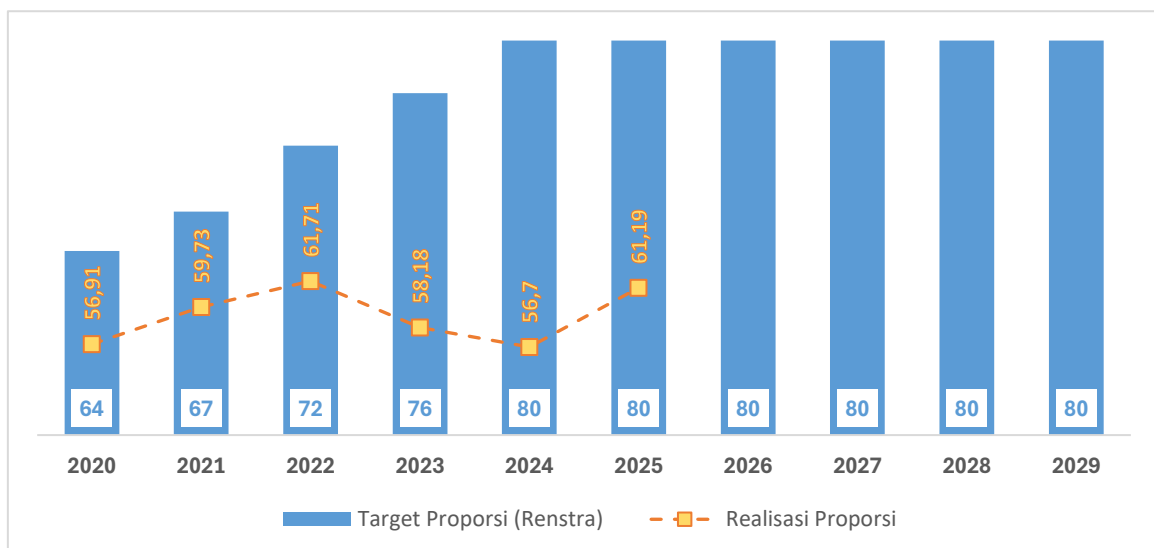
Gambar 10. Grafik Data Kapal dan Jumlah Trip Logbook Penangkapan Ikan Tahun 2025

Pengumpulan data dan verifikasi data logbook dilakukan menggunakan elektronik log book penangkapan ikan yang dirangkum dalam aplikasi e-Logbook. Data kapal perikanan yang telah melaporkan log book di 11 WPPNRI dan Laut Lepas sebanyak 15.207 unit kapal dengan jumlah trip sebanyak 102.956 trip. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami peningkatan (14.665 unit kapal dan 89.992 trip). Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya cakupan pencatatan aktivitas penangkapan ikan secara elektronik yang diiringi dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pelaporan kegiatan operasional.



Gambar 11. Grafik sebaran penempatan Observer per Hari Layar Tahun 2025

Selain log book, Observer juga memiliki peranan penting dalam pengendalian hasil tangkapan. Penempatan Observer di atas kapal sebanyak 79 orang dilaksanakan mulai awal Januari s.d. Desember 2025 di 8 WPPNRI dan Laut Lepas dengan 148 unit kapal dan jumlah hari layar sebanyak 10.408. Jumlah ini berkurang dibandingkan dengan tahun 2024 karena mulai tahun 2025, terdapat kebijakan penyediaan observer dialihkan kepada pemilik kapal dengan memanfaatkan penyedia jasa pemantau (observer). Namun hal ini tidak mengurangi proses pengendalian hasil tangkapan yang ditunjukkan dengan peningkatan data penggunaan logbook penangkapan ikan yang memperlihatkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pelaporan kegiatan operasional.



Gambar 12. Target Proporsi periode 2020-2024 dan 2025-2029 serta Realisasi Capaian

Pada periode Renstra 2020-2024, target IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman” ditetapkan meningkat secara bertahap dari 64% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024. Sepanjang periode tersebut, realisasi capaian indikator secara konsisten berada di bawah target tahunan, dengan capaian sebesar

56,91% pada tahun 2020, 59,73% pada tahun 2021, 61,71% pada tahun 2022, 58,18% pada tahun 2023, dan 56,7% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pemanfaatan sumber daya ikan nasional masih berada dalam batas biologis yang aman dan terkendali. Adapun fluktuasi capaian memperlihatkan adanya dinamika pemanfaatan sumber daya ikan yang dipengaruhi oleh perubahan intensitas penangkapan, distribusi upaya penangkapan antar WPPNRI, serta peningkatan kualitas dan cakupan data hasil tangkapan. Penurunan realisasi pada tahun 2023 dan 2024, yang tetap berada di bawah target, justru mengindikasikan membaiknya kondisi pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, sejalan dengan mulai diterapkannya berbagai kebijakan pengelolaan perikanan berbasis kuota dan penguatan pengawasan. Berdasarkan evaluasi capaian periode 2020-2024 dan konsistensi capaian realisasi yang berada di bawah ambang batas target, penetapan target indikator pada periode Renstra 2025-2029 dilakukan dengan mempertahankan nilai target sebesar 80%. Penetapan target ini dimaksudkan sebagai batas pengaman dalam memastikan bahwa peningkatan aktivitas penangkapan ikan di masa mendatang tetap berada dalam koridor keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini yang menyebabkan target IKU “Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman” periode 2025-2029 tidak hanya sebagai sasaran kinerja organisasi, tapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Dalam mendukung capaian IKU ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung, seperti:

- a. penerbitan Permen KP Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kuota Penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*);
- b. penerbitan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap a.n. Menteri KP Nomor B.1609/DJPT.1/HK.410/XII/2025 tentang Tata Kelola Ikan Tuna Sirip Biru Selatan (*Thunnus maccoyii*) di WPPNRI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia;
- c. pengembangan dan peluncuran E-Logbook Penangkapan Ikan versi 3;
- d. penerbitan Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap a.n. Menteri KP Nomor B.784/DJPT/HK.410/VII/2025 tentang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Melalui Penempatan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
- e. penerbitan Surat Edaran Plt. Dirjen Perikanan Tangkap a.n. Menteri KP Nomor B.828/DJPT/HK.410/VII/2025 tentang Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Melalui Penempatan Pemantau di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Pada Masa Transisi;
- f. sosialisasi kebijakan dan sistem pelaporan observer berbasis aplikasi (e-Obor);
- g. penyelenggaraan pertemuan tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 712, 713, 714, 715;
- h. penyelenggaraan workshop finalisasi hasil analisis dan dokumen *stock assessment* kakap dan kerapu; dan
- i. rapat koordinasi UPP WPPNRI 573 dan 572 membahas pemanfaatan kuota penangkapan Benih Bening Lobster

3.2.3. Sasaran Program (SP-3): Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan

Sasaran Program-3 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Volume Produksi Perikanan Tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing.

Volume produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP. Pendataan produksi perikanan tahun 2025 saat ini masih dalam proses input dan validasi, data sampling masih belum mencukupi untuk diagregatkan sehingga Pusdatin KKP bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan estimasi data produksi triwulan IV tahun 2025. Estimasi produksi perikanan menggunakan pendekatan pertumbuhan rata-rata (*Moving Average*) dan metode *Single Exponential Smoothing* (SES) dengan mempertimbangkan laporan produksi dari pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah.

Tabel 5. Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2025

SP 3		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan							
IKU 3		Volume Produksi Perikanan Tangkap							
		Realisasi Tahun 2020-2024				Realisasi Tahun 2025			Renstra KKP
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Akhir Renstra
7,70	8,09	7,99	7,77	7,39	6,19	7,85	126,82	7,50	104,67

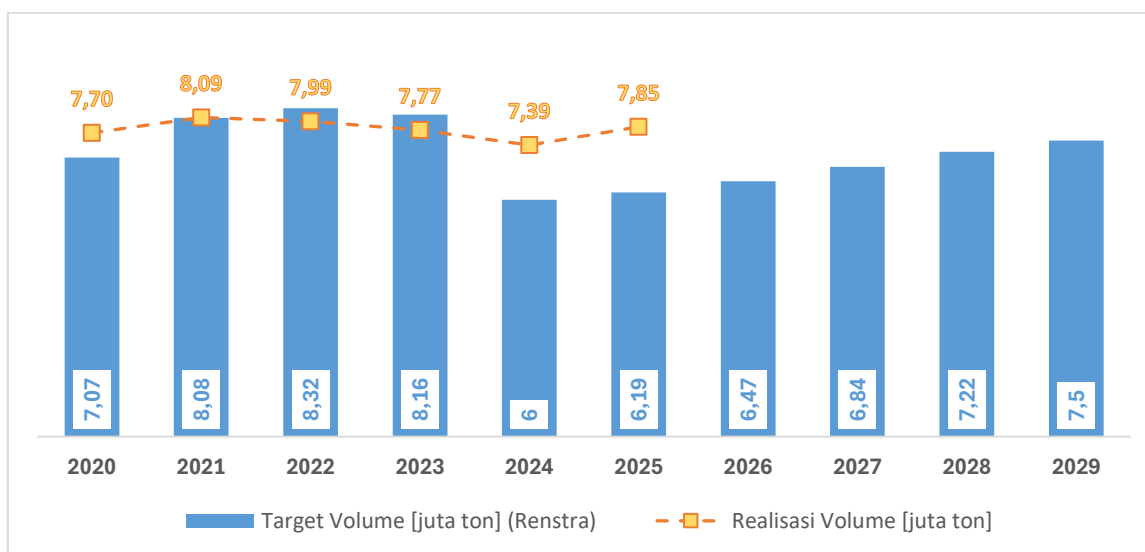
Produksi perikanan tangkap tahun 2025 tercatat sebesar 7,85 juta ton. Capaian ini berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 126,82% dari target tahun 2025 sebesar 6,19 juta ton. Secara rinci, volume produksi perikanan tangkap tersebut didominasi oleh tangkapan di laut sebesar 7,38 juta ton atau sekitar 94,05%. Sementara sisanya sebesar 0,47 juta ton atau sekitar 5,95% berasal dari perairan umum darat (PUD).

Tabel 6. Perbandingan capaian tahun 2025 terhadap realisasi beberapa tahun sebelumnya

Perairan	Realisasi Tahun (ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laut	7.485.872	7.412.410	7.248.410	6.924.276	7.383.005
PUD	602.575	575.292	521.690	468.561	467.195

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusdatin KKP Nomor 126/SJ.8/TU.210/I/2026, tanggal 12 Januari 2026, perihal Penyampaian Capaian Sementara Produksi Perikanan Tahun 2025, produksi perikanan tangkap di triwulan IV mengalami peningkatan sebesar 18,96% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024 (*y on y*) dan meningkat 19,83% dibandingkan dengan triwulan III tahun 2025 (*q to q*). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan produksi

yang didaratkan di pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Daerah. Sepanjang tahun 2025, berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusdatin KKP tentang Penyampaian Capaian Produksi Perikanan per Triwulan, tercatat sejumlah pelabuhan perikanan menunjukkan peningkatan produksi yang konsisten di ≥ 3 triwulan, seperti PPS Bitung (peningkatan pada triwulan I, II, III, dan IV dengan total volume produksi 88.655,50 ton), PPN Tual (peningkatan pada triwulan I, II, dan III dengan total volume produksi 6.408,27 ton), PPN Pemangkat (peningkatan pada triwulan I, III, dan IV dengan total volume produksi 12.582,48 ton), PPN Sungailiat (peningkatan pada triwulan II, III, dan IV dengan total volume produksi 4.687,14 ton), dan PPS Cilacap (peningkatan pada triwulan II, III, dan IV dengan total volume produksi 38.540,64 ton). Kondisi ini mengindikasikan kinerja operasional dan aktivitas pendaratan ikan yang relatif stabil dan meningkat sepanjang tahun, serta mencerminkan peran strategis pelabuhan perikanan dalam mendukung produksi perikanan tangkap nasional.



Gambar 13. Target Volume periode 2020-2024 dan 2025-2029 serta Realisasi Capaian

Capaian volume produksi perikanan tangkap selama periode 2020–2024 secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi produksi masing-masing sebesar 7,70 juta ton dan 8,09 juta ton, telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi produksi tercatat sebesar 7,99 juta ton dan 7,77 juta ton, sedikit di bawah target, namun masih berada pada tingkat produksi yang relatif tinggi dan stabil. Pada tahun 2024, target volume produksi perikanan tangkap ditetapkan sebesar 6,00 juta ton, lebih rendah dibandingkan target tahun sebelumnya. Penurunan target tersebut merupakan kebijakan dimaksudkan untuk mengurangi tekanan penangkapan yang semakin tinggi, ditandai antara lain oleh semakin jauhnya daerah penangkapan ikan, ukuran ikan yang cenderung mengecil, serta penurunan nilai Catch per unit Effort (CPUE). Selain itu, hasil estimasi potensi sumber daya ikan yang dilakukan oleh Komnas Kajiskan menunjukkan adanya penurunan kelompok sumber daya ikan yang berada di bawah batas optimum. Meskipun target diturunkan, realisasi produksi tahun 2024 justru mencapai 7,39 juta ton, jauh di atas target yang ditetapkan. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas produksi perikanan tangkap nasional masih cukup besar.

Berdasarkan evaluasi capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” periode 2020-2024, penetapan target volume produksi perikanan tangkap pada periode Renstra 2025-2029 dilakukan secara lebih terukur dan bertahap. Target produksi tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,19 juta ton dan meningkat secara gradual hingga 7,50 juta ton pada tahun 2029.

Penetapan target tersebut mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, sekaligus mendorong perubahan orientasi usaha perikanan dari peningkatan volume semata menuju peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil tangkapan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kinerja produksi perikanan tangkap dan keberlanjutan sumber daya ikan, serta mendukung pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dalam jangka menengah dan panjang.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target volume produksi perikanan tangkap diantaranya:

- a. optimalisasi pelayanan rutin pelabuhan perikanan (layanan tambat labuh, pembongkaran ikan, penerbitan SPB, SHTI, dan pelayanan lainnya);
- b. penyelenggaraan gerai perizinan berusaha dan pelayanan dokumen kapal perikanan di 9 (sembilan) lokasi sepanjang tahun 2025;
- c. monitoring dan evaluasi pendataan produksi dan penarikan PNBP sumber daya alam (SDA) perikanan di sejumlah pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan;
- d. penyaluran bantuan kepada nelayan berupa alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan;
- e. penempatan petugas pendataan/ enumerator sebanyak 440 petugas yang tersebar di pelabuhan perikanan pusat dan daerah; dan
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis pendataan produksi ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan kepada para Enumerator.

3.2.4.Sasaran Program (SP-4): Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan

Sasaran Program-4 “Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan”, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan. Indikator ini menunjukkan kelembagaan ekonomi nelayan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pembinaan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi nelayan. Penguatan basis ekonomi nelayan melalui peningkatan kapasitas organisasi, manajerial, dan kewirausahaan kelembagaan nelayan. Fasilitasi tersebut meliputi kegiatan pembinaan tata kelola kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, akses terhadap pembiayaan dan pasar, serta penguatan jejaring kemitraan.

Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima mandat: a) mendorong kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUB, Poklahsar, Pokdakan dan Kelompok Petambak Garam) bergabung di dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan b) mendorong Koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi KDKMP. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral, KKP melalui Ditjen Perikanan tangkap telah mencanangkan program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebanyak 100 lokasi di tahun 2025. Program KNMP ini bersinergi dengan KDKMP yang ditetapkan sebagai Kelompok Masyarakat Pengelola bantuan sarana dan prasarana di kawasan KNMP.



Gambar 14. Infografis Ringkasan Pembangunan KNMP Tahun 2025

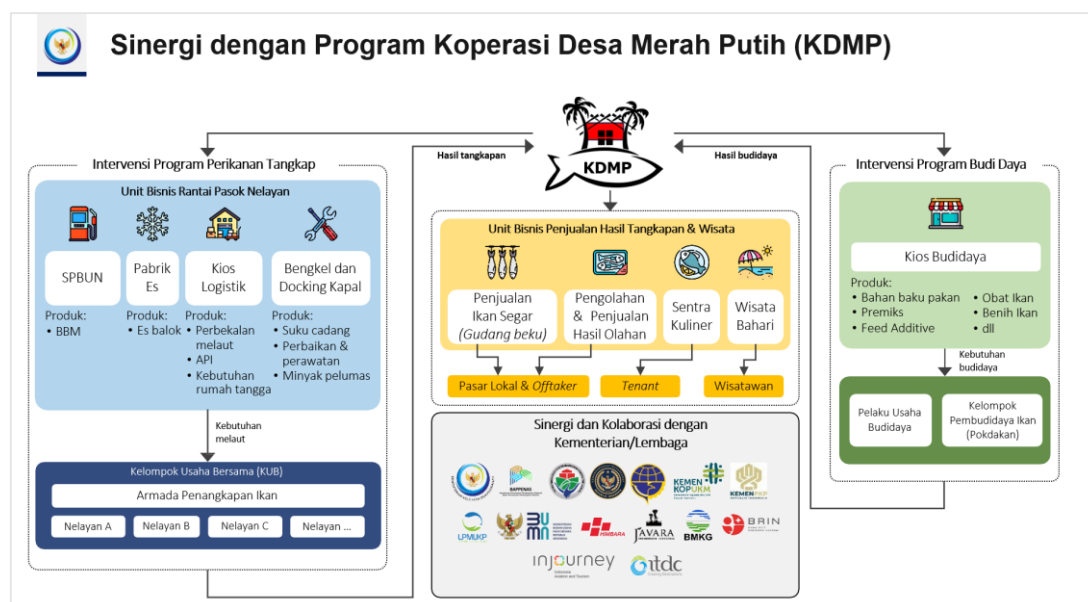
Pada Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan amanat dari Presiden RI dalam melaksanakan program prioritas dalam bentuk program Kampung Nelayan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral sebanyak 100 lokasi di tahun 2025 yang tersebar di 30 Provinsi dan 93 Kabupaten/Kota dengan rincian Tahap I sebanyak 65 lokasi dan Tahap II sebanyak 35 lokasi. Intervensi program mencakup aspek fisik dan non fisik yang terintegrasi mulai dari pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perikanan, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan sarana rantai dingin, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan nelayan.

Pada aspek fisik, dilakukan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung perikanan melalui pembangunan tambatan perahu, fasilitas docking, shelter nelayan, revetment, kios nelayan, tempat pembuangan sampah, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), SPBUN, serta bangunan kantor dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan penguatan sarana penangkapan ikan berupa penyediaan paket kapal perikanan sejumlah 239 unit, mesin kapal sejumlah 550 unit, dan alat penangkapan ikan sejumlah 14.700 unit. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan nilai tambah hasil perikanan, program ini juga mencakup pengembangan sarana rantai dingin melalui pembangunan gudang beku sejumlah 54 unit, pabrik es sejumlah 62 unit, kendaraan berpendingin sejumlah 63 unit, serta penyediaan coolbox sejumlah 3.250 unit untuk menjaga mutu hasil tangkapan hingga ke tingkat pemasaran.

Pada aspek non fisik, program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian nelayan melalui kegiatan capacity building dan penguatan kewirausahaan, pengolahan hasil perikanan, pendampingan usaha, fasilitasi akses pemasaran, serta diversifikasi mata pencaharian nelayan. Penguatan kelembagaan nelayan dilakukan melalui pendirian dan pengembangan koperasi, baik koperasi unit bisnis maupun koperasi korporasi nelayan, sebagai sarana konsolidasi usaha dan peningkatan posisi tawar nelayan. Di samping itu, dilakukan fasilitasi sertifikasi, standardisasi, dan perizinan antara lain berupa SKN, HACCP, SSOP, GMP, KKPRIL bagi kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, serta perizinan berusaha dengan kolaborasi lintas Eselon I lingkup KKP untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan daya saing produk perikanan.

Tabel 7. Capaian IKU “Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan” Tahun 2025

SP 4	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan								
IKU 4	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan								
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra KKP	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	4	4	100	20	20

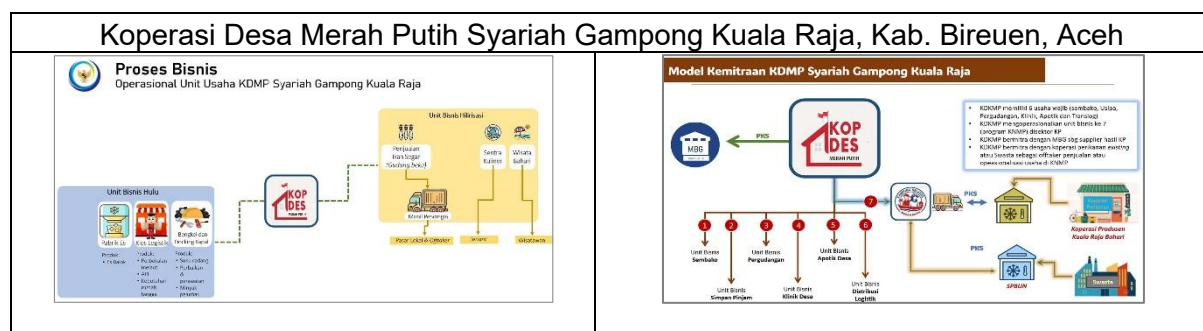


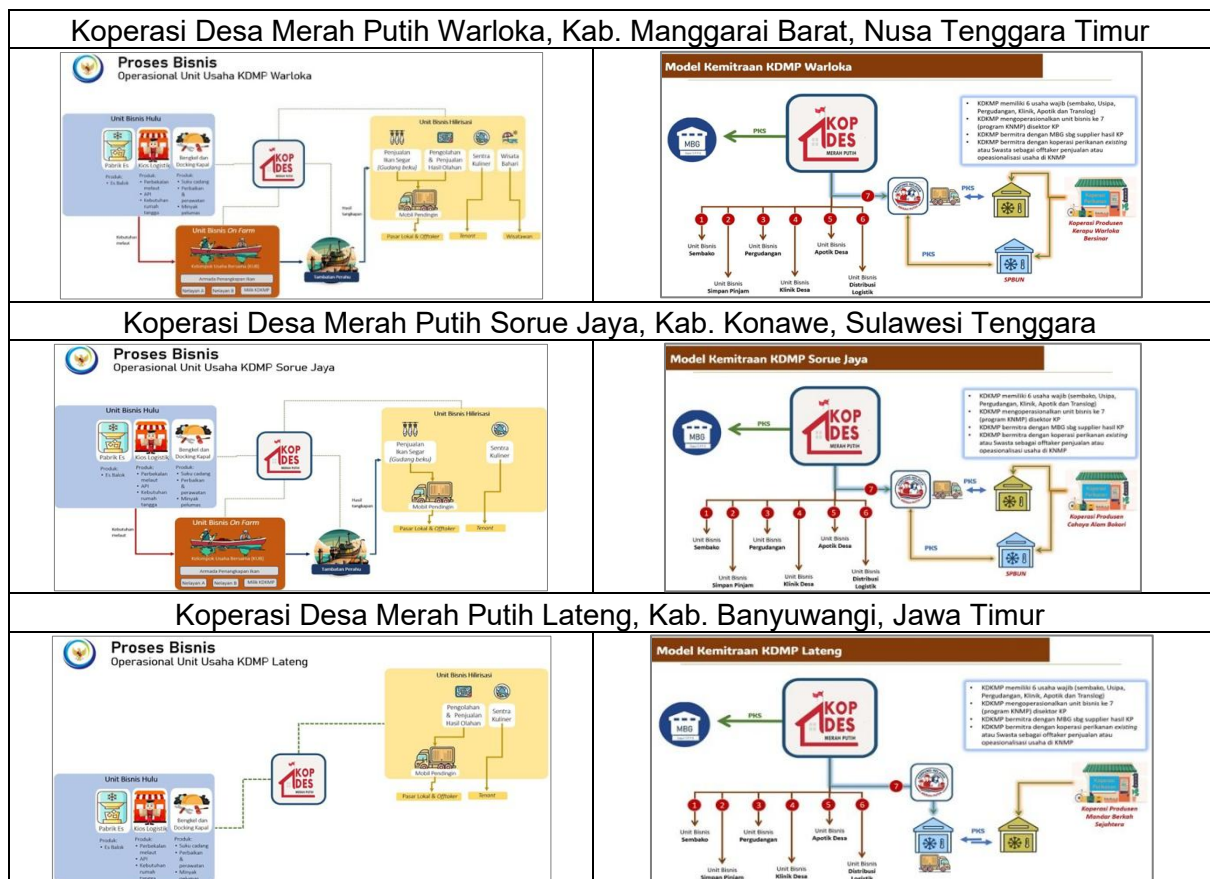
Gambar 15. Sinergi Program KNMP dengan KDMP

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi nelayan di lokasi KNMP, pada tahun 2025 dilakukan integrasi kelompok-kelompok masyarakat di kawasan KNMP yang meliputi: KDKMP, Koperasi Nelayan *existing* berbasis korporasi nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Berdasarkan penetapan lokasi KNMP dan lokasi pengembangan Koperasi Nelayan berbasis korporasi nelayan, terdapat 4 lokasi yang menjadi sasaran kegiatan:

1. Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja, Kab. Bireuen, Aceh;
2. Koperasi Desa Merah Putih Warloka, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur;
3. Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara; dan
4. Koperasi Desa Merah Putih Lateng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.

Aspek indikator yang menjadi acuan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi nelayan di 4 lokasi tersebut adalah kelembagaan dan tata kelola, model bisnis dan pengembangan kemitraan usaha dengan hasil capaian sebagaimana gambar berikut:





Gambar 16. Proses Bisnis dan Model Kemitraan di 4 Lokasi Koperasi Desa Merah Putih

Strategi peningkatan kelembagaan ekonomi nelayan ini dalam mencapai target IKU ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. dalam rangka penguatan SDM Pengelola KNMP di dalam KDKMP calon penerima manfaat bantuan KNMP, dilakukan dengan memberikan peningkatan keterampilan (*capacity building*) pengurus/anggota KDKMP dengan materi penyusunan dokumen AD/ART, model bisnis KNMP, Rencana Pengembangan Koperasi, dokumen operasional (SOP dan Instruksi Kerja) dan teknik pengelolaan keuangan;
2. dalam rangka penguatan tenaga pendamping KNMP, dilakukan dengan memberikan pelatihan (*coaching clinic*) kepada tenaga pendamping KKP (Penyuluh Perikanan dan UPT Pusat KKP) berupa kemampuan pendampingan KDKMP dengan pemenuhan aspek kelembagaan dan tata kelola koperasi, aspek keuangan, aspek bisnis/usaha koperasi dan aspek digitalisasi koperasi; dan
3. dalam rangka akselerasi kesiapan perencanaan dan operasional KDKMP dalam mengelola fasilitas bantuan KNMP, dilakukan penempatan Tenaga Pendamping Pemberdayaan dan Masyarakat (TPPM) KNMP untuk membantu pengurus/pengelola KNMP di dalam KDKMP mempersiapkan seluruh dokumen perencanaan dan operasional yang dibutuhkan KDKMP untuk optimal mengelola bantuan KNMP.

Berkaitan dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan sebagai upaya pembinaan berkelanjutan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berkomunikasi dengan unit kerja terkait melakukan penguatan kelembagaan agar tercapai skala ekonomi yang optimal melalui pelaksanaan:

1. fasilitasi peningkatan manajemen usaha bagi KUB dan Koperasi Perikanan existing untuk mengintegrasikan usahanya didalam kawasan KNMP yang dikelola oleh KDKMP;

2. fasilitasi pengembangan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, melalui pemberian pengetahuan keterampilan kepada nelayan dan keluarganya di sekitar kawasan KNMP;
3. fasilitasi akses kemitraan antara KDKMP pengelola KNMP dengan pelaku usaha lainnya baik ditingkat lokal, regional maupun nasional; dan
4. fasilitasi akses pembiayaan kepada KDKMP pengelola KNMP untuk memperkuat modal operasional.

3.2.5. Sasaran Program (SP-5): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sasaran Program-5 “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap”, memiliki Indikator Kinerja Manajerial yakni Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Sasaran program ini bertujuan untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi *General* lingkup DJPT yang berasal dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Dalam mengukur kemajuan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diperlukan serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai yang disebut evaluasi reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap RB *General* adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Evaluasi dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian RB di instansi pemerintah; memantau rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi RB periode sebelumnya; serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB. Nilai indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Evaluasi RB *General* ini penting untuk memastikan bahwa upaya reformasi birokrasi memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 8. Capaian IKU “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” Tahun 2025

SP 5		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap							
IKU 5		Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
Realisasi Tahun 2020-2024					Realisasi Tahun 2025			Renstra KKP	
2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025	Target Renstra 2029	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	86	88,60	103,02	88	100,68

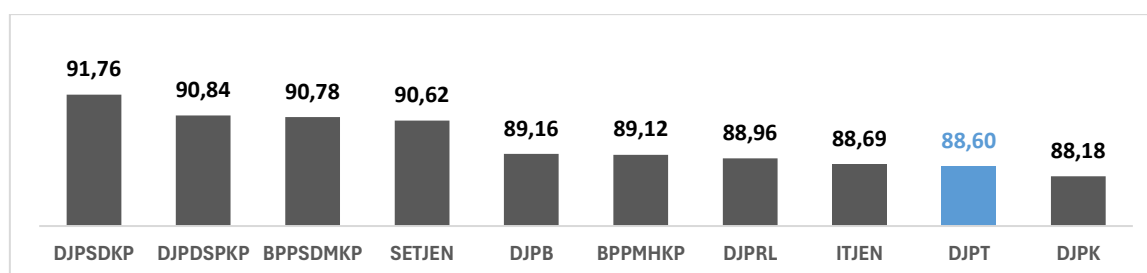
Indikator komposit pembentuk serta capaian nilai implementasi RB disajikan dalam tabel 7. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Manajerial (IKM), Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT mencapai 88,60, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi

birokrasi memperlihatkan capaian DJPT dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pengawasan dan pelayanan sudah baik sekali. Sejumlah indikator strategis menunjukkan kinerja optimal (capaian 100), antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, menandakan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas keuangan negara dan penguatan fungsi pengawasan. Selain itu, persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP dan penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan menunjukkan meningkatnya transparansi, kepatuhan regulasi, dan tertib administrasi.

Pada aspek penguatan sistem internal, Nilai PM SAKIP, Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA), dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) terlihat bahwa perencanaan dan pengelolaan kinerja serta anggaran telah berjalan cukup efektif, meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas pada aspek konsistensi perencanaan dan optimalisasi pelaksanaan anggaran. Indeks Profesionalitas ASN dan nilai pengawasan kearsipan internal juga menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas SDM dan tata kelola administrasi. Namun masih terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian, yaitu Nilai Pembangunan Integritas dan persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 serta SOP, yang berdampak pada terbatasnya kontribusi nilai indikator dan menunjukkan perlunya akselerasi perbaikan pada penyusunan proses bisnis dan SOP serta penguatan budaya integritas di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 9. Indikator Komposit dan Capaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT

Indikator Kinerja	Bobot	Capaian	Nilai
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	10	87,81	8,78
Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	10	100	10
Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	10	89,19	8,92
IKPA Ditjen Perikanan Tangkap	10	85,50	8,55
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	10	85,83	8,58
Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	10	4,02	8,04
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	10	88,04	8,80
Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	10	96,20	9,62
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	5	100	5
Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	5	81,18	4,06
Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang Perikanan Tangkap	5	100	5
Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP Ditjen Perikanan Tangkap	5	65	3,25
Nilai Implementasi RB DJPT			88,60



Gambar 17. Grafik Perbandingan Capaian Nilai Implementasi RB lingkup KKP

Dalam upaya memenuhi target indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi, DJPT telah melaksanakan kegiatan:

1. koordinasi intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT dalam menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai;
2. koordinasi internal antar unit kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dalam menindaklanjuti temuan hasil pengawasan dan LHP;
3. penilaian SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025 oleh Inspektorat II dan penilaian mandiri SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025
4. komunikasi intensif dengan satker DJPT serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun;
5. koordinasi dengan seluruh unit kerja lingkup DJPT dalam pengisian capaian output setiap triwulan dan melaksanakan realisasi kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan pagu Standar Biaya Keluaran (SBK);
6. pemantauan manajemen risiko berkala, pelaporan SPIP berkala, rekonsiliasi pengisian kertas kerja PM Maturitas SPIP, dan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penyelarasan kertas kerja penetapan tujuan;
7. pemutakhiran data ASN (mutasi, diklat, kenaikan jenjang, dan kenaikan pangkat), pemantauan dan evaluasi data Human Capital Development Plan (HCDP), serta pendampingan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional P3T dan AP3T;
8. penyusunan dokumen pengelolaan arsip dinamis dan monitoring dan evaluasi arsip, penginputan data kearsipan pada aplikasi SIKN ANRI, penyampaian daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif, dan arsip vital ke Biro Umum, serta pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap;
9. koordinasi dalam pemutakhiran data RUP secara berkala dan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa hingga proses penyelesaian kontrak/surat perjanjian PBJ secara tepat waktu;
10. sosialisasi dan *public campaign* terkait info pelatihan konflik kepentingan, identifikasi pengisian form Daftar Kepentingan Pribadi dan Deklarasi Benturan Kepentingan, penyusunan SOP terkait konflik kepentingan, pemantauan terhadap pembangunan zona integritas pada PPS Belawan, PPN Karangantu, dan PPN Pengambengan;
11. penyampaian rancangan Permen KP tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan kepada Kementerian Hukum RI untuk proses harmonisasi serta ditetapkannya 3 (tiga) Kepmen KP terkait WKOPP dan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan;
12. penyusunan matriks keterkaitan antara fungsi unit kerja, peta lintas fungsi, dan SOP di seluruh Direktorat serta penyusunan peta lintas fungsi Direktorat PSDI, Direktorat KP, serta Direktorat PPN.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2.664.335.557.000,- atau naik 170% dari pagu alokasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2025 terjadi dinamika perubahan anggaran yang cukup signifikan, yaitu pada triwulan I hingga triwulan II terdapat kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta pada triwulan III hingga triwulan IV terdapat penambahan anggaran akibat kebijakan relaksasi anggaran untuk mendukung program prioritas Presiden RI dalam bentuk program Kampung Nelayan Merah Putih. Adapun alokasi

anggaran efektif Ditjen Perikanan Tangkap pasca efisiensi dan relaksasi anggaran menjadi Rp2.561.432.513.000,-. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.824.098.491.423,- atau mencapai 71,21%. Berdasarkan postur anggaran, alokasi 70,42% digunakan untuk belanja barang; 19,92% untuk belanja modal; dan 9,66% untuk belanja pegawai.

Tabel 10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	328.235.805.000	327.116.759.000	266.033.031.151	81,33
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	726.320.927.000	664.715.982.000	113.129.015.193	17,02
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	1.132.738.156.000	1.127.142.838.000	1.009.513.072.744	89,56
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.676.570.000	28.676.570.000	28.651.778.142	99,91
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPT	439.364.099.000	413.780.364.000	406.771.594.193	98,31
TOTAL		2.664.335.557.000	2.561.432.513.000	1.824.098.491.423	71,21

Berdasarkan jenis kegiatan, persentase realisasi tertinggi berada pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar 99,91% namun dengan anggaran efektif yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan dengan persentase realisasi terendah berada pada kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan capaian hanya sebesar 17,02%. Sebagian besar alokasi anggaran pada kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan adalah bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk program pengembangan Pelabuhan Perikanan. Pada kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan terhitung persentase realisasi sebesar 81,33% yang merupakan capaian terendah sebelum kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan. Program Prioritas Presiden RI dalam bentuk Kampung Nelayan Merah Putih terdapat pada kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan yang diampu oleh Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan capaian realisasi sebesar 89,56%.

Tabel 11. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Rupiah Murni (RM)	1.887.612.235.000	1.868.368.345.000	1.682.880.604.168	90,07
2	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	666.050.000.000	610.276.923.000	69.304.946.349	11,36
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	71.538.217.000	45.918.166.000	45.454.768.399	98,99
4	Hibah Luar Negeri (HLN)	13.692.000.000	11.425.974.000	1.015.067.507	8,88
5	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)	25.443.105.000	25.443.105.000	25.443.105.000	100
TOTAL		2.664.335.557.000	2.561.432.513.000	1.824.098.491.423	71,21

Berdasarkan sumber dana, jenis belanja tertinggi terdapat pada sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) dengan capaian optimal 100% yang merupakan kegiatan Hibah GEF-6 dengan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai pengampu kegiatan. Capaian tertinggi selanjutnya terdapat pada sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 98,99% lalu diikuti oleh Rupiah Murni (RM) dengan capaian 90,07%. Adapun persentase capaian terendah terdapat pada sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 11,36% dan diikuti oleh Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar 8,88%. Pada sumber dana ini terdapat kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan dengan sumber dana PHLN yang berasal dari lender Agence Française de Développement (AFD), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Development Bank (ADB). Capaian sumber dana PHLN masih tergolong sangat rendah dikarenakan terdapat kendala pelaksanaan kegiatan akibat adanya kebijakan internal.

Tabel 12. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	247.371.621.000	247.371.621.000	242.117.269.787	97,88
2	Belanja Barang	1.871.462.328.000	1.803.813.142.000	1.553.363.757.408	86,12
3	Belanja Modal	545.501.608.000	510.247.750.000	28.617.464.228	5,61
TOTAL		2.664.335.557.000	2.561.432.513.000	1.824.098.491.423	71,21

Berdasarkan jenis belanja, persentase jenis belanja tertinggi adalah belanja pegawai dengan capaian 97,88%, diikuti belanja barang dengan capaian 85,62%, serta belanja modal yang hanya mencapai 5,61%. Adapun penyebab rendahnya capaian realisasi belanja modal disebabkan alokasi pekerjaan fisik pada pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN yang terkendala sehingga tidak memungkinkan serapan yang optimal pada tahun 2025 dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tabel 13. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	1.802.758.131.000	1.754.035.314.000	1.498.446.723.543	85,43
2	UPT	861.413.126.000	807.232.899.000	325.489.963.615	40,32
3	Tugas Pembantuan	164.300.000	164.300.000	161.804.265	98,48
TOTAL		2.664.335.557.000	2.561.432.513.000	1.824.098.491.423	71,21

Berdasarkan kewenangan, persentase capaian realisasi anggaran terdapat pada satker lingkup Tugas Pembantuan (TP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan capaian sebesar 98,48% namun dengan anggaran efektif yang sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan hampir seluruh anggaran untuk alokasi TP diefisiensikan dan hanya bisa untuk menjalankan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada awal tahun 2025. Persentase capaian tertinggi selanjutnya terdapat pada satker Pusat dengan capaian sebesar 85,21%. Adapun realisasi lingkup satker Pusat belum optimal diakibatkan oleh kendala pada pelaksanaan program pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN serta masih terdapat alokasi sisa kontrak dari program Kampung Nelayan Merah Putih. Persentase capaian terendah terdapat pada satker lingkup UPT dengan capaian sebesar 40,32%. Hal ini disebabkan mayoritas anggaran pada beberapa satker UPT adalah alokasi pembangunan fisik atau konstruksi pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN yang belum dapat terealisasi. Adapun satker UPT yang memiliki alokasi

anggaran PHLN antara lain PPS Kendari, PPS Bitung, PPS Cilacap, PPS Belawan, PPN Pengembangan, dan PPN Kejawanen.

Berdasarkan capaian serapan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 sebesar 71,21%, tercatat masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp737.334.021.577 atau sebesar 28,79% dari total pagu efektif. Sisa anggaran tersebut secara garis besar berasal dari kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN serta sisa anggaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang belum optimal. Kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN terkendala akibat adanya kebijakan internal yang mengharuskan pelaksanaan pengadaan PBJ untuk kontraktual pekerjaan fisik dengan tanpa uang muka melalui mekanisme pembayaran termin 40-40-20 sesuai dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.920/MEN-KP/IX/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kegiatan pembangunan KNMP, capaian realisasi anggaran belum maksimal karena masih terdapat sebagian sisa kontrak fisik dari setiap lokasi Tahap I, pengadaan bantuan sarana rantai dingin dan masih terdapat pelaksanaan Pembangunan Tahap II secara *Multi Years Contract* (MYC).

Selain permasalahan sisa serapan anggaran, terdapat permasalahan terkait tunggakan pembayaran kontraktual Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan oleh terjadinya keterlambatan/penolakan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN Jakarta VI (175) pada pekerjaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun Anggaran 2025 karena melebihi tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025 dengan total nominal sebesar Rp100.635.113.792,- yang mencakup kegiatan berupa pengadaan sarana rantai dingin tahap I, alat penangkapan ikan tahap I, uang muka konstruksi KNMP tahap II, serta konsultan perencanaan. Adapun tindak lanjut penyelesaian tunggakan ini berupa pembayaran tunggakan dengan beban DIPA Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme revisi DIPA.

3.4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan terbaik antara input berupa anggaran dengan output berupa kinerja unit kerja, yakni pencapaian hasil yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Dengan kata lain, efisiensi mencerminkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang berhasil dicapai. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Perhitungan efisiensi anggaran menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perhitungan efisiensi anggaran dilakukan dengan formula berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Tabel 14. Efisiensi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan Sasaran Program

No	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	NPSS Kinerjaku	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1.121.311.554.000	1.003.834.884.470	98,91	89,52	9,39
2	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	28.676.570.000	28.651.778.142	120,00	99,91	20,09
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	375.458.508.000	314.017.221.449	120,00	83,64	36,36
		621.702.897.000*	70.428.661.856*	-	11,33	-
4	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan	502.620.000	394.351.313	100,00	78,46	21,54
5	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Pengelolaan Perikanan Tangkap	413.780.364.000	406.771.594.193	103,02	98,31	4,71

*Sumber Dana PHLN

Pada sasaran program Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan, alokasi anggaran sebesar Rp28,68 miliar direalisasikan sebesar 99,91% dengan nilai NPSS mencapai 120. Tingkat efisiensi anggaran sebesar 20,09% menunjukkan bahwa capaian kinerja yang melampaui target dapat dicapai melalui pemanfaatan anggaran yang optimal sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program efektif dan efisien sesuai perencanaan.

Pada sasaran program Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan, anggaran yang terealisasi sebesar 78,46% dari alokasi anggaran efektif yang tersedia dengan nilai NPSS 100 dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 21,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat tercapai dengan anggaran yang minimal dan efisien.

Pada sasaran program Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap, realisasi anggaran mencapai 98,31% dengan nilai NPSS sebesar 103,02 dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,71%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan lingkup Dukungan Manajerial berjalan sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran difokuskan untuk mendukung pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Pada sasaran program Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan, anggaran dengan sumber dana diluar PHLN yang terealisasi sebesar 83,64% dari alokasi anggaran efektif yang tersedia dengan nilai NPSS 120 dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 36,36%. Adapun pada sasaran program tersebut terdapat unsur kegiatan pengembangan Pelabuhan Perikanan sumber dana PHLN yang belum dimulai pelaksanaan konstruksi fisiknya sehingga capaian belum dapat terpenuhi. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka tetap memenuhi capaian sasaran program antara lain optimalisasi pelayanan rutin lingkup Pelabuhan Perikanan, sinergi antar stakeholders baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, dan nelayan yang salah satunya ditunjukkan dalam pelayanan perizinan perikanan tangkap, serta optimalisasi pencatatan produksi dalam bentuk sinergi bersama pemerintah daerah melalui optimalisasi validator organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi di Pelabuhan Perikanan pusat dan daerah yang tetap mendukung peningkatan produksi.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) periode tahun 2025. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun 2025, rata-rata pencapaian sasaran program DJPT adalah sebesar 108,39% (bernilai Baik). Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025, dari total 5 (lima) Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya belum 100%, yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian hanya 98,91% (realisasi capaian 103,86 dari target 105). NTN tidak tercapai karena sepanjang tahun 2025 meskipun terdapat perbaikan harga jual hasil tangkapan ikan, namun dari sisi pengeluaran nelayan masih secara signifikan menahan laju kenaikan NTN, sehingga menggerus keuntungan atau daya beli nelayan. Namun 3 (tiga) indikator kinerja lain menunjukkan capaian di atas 100%, yaitu Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (capaian 61,19 atau 123,51% dari target), Volume Produksi Perikanan Tangkap (capaian 7,85 juta ton atau 126,82% dari target), dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (capaian 88,60 atau 103,02%). IKU Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan mendapatkan realisasi sebanyak 4 kelembagaan nelayan dari target 4 atau sebesar 100%.

Terkait peningkatan capaian NTN, beberapa upaya yang dapat dilakukan berupa penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan, disertai optimalisasi dukungan sarana dan prasarana penangkapan ikan agar kegiatan usaha nelayan berjalan lebih produktif. Selain itu, peningkatan kapasitas nelayan terus didorong melalui pembinaan dan pendampingan teknis guna memperbaiki keterampilan dan efisiensi usaha penangkapan.

Dalam rangka peningkatan kinerja DJPT, telah dilakukan beberapa tindak lanjut atas evaluasi laporan kinerja tahun 2024, yaitu;

1. Terkait peningkatan capaian NTN, telah dilakukan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah (alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan), pemberdayaan nelayan (diversifikasi usaha nelayan dan fasilitasi pendanaan usaha), peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan/awak (pelatihan *Basic Safety Training Fisheries* atau BST-F dan pelatihan pengolahan ikan), dan permudah akses BBM subsidi (percepatan pendataan nelayan penerima BBM subsidi dengan kartu KUSUKA, penyederhanaan persyaratan penerima BBM subsidi dan digitalisasi distribusi BBM Nelayan);
2. Terkait peningkatan capaian PNPB telah dilakukan monitoring pendataan produksi dan penerimaan PNPB SDA perikanan, penyelenggaraan Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut, Polairud, Bakamla, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub,

pelatihan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan Petugas Kesyahbandaran, bimbingan teknis pendataan produksi ikan hasil tangkapan kepada para enumerator, penyelenggaraan gerai perizinan berusaha di 9 lokasi, dan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2025;

3. Terkait peningkatan capaian IKPA telah dilakukan koordinasi antar satker Halaman III DIPA secara tepat waktu dan sesuai prosedur, percepatan proses pengadaan dan meningkatkan penyerapan anggaran, dan peningkatan kualitas dokumen pertanggungjawaban

LAMPIRAN

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105
2.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	2	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen)	≤ 80
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	3	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan	4	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga)	4
5.	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Pengelolaan Perikanan Tangkap	5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.199.478.353.000
	a. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	
	b. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	
	c. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	
	d. Pengelolaan Sumber Daya Ikan	
2.	Program Dukungan Manajemen	439.139.099.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025		2.638.617.452.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

Data Nilai Tukar Nelayan Tahun 2025

Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) serta Perubahannya (2018=100), 2025

Terakhir Diperbarui : 5 Januari 2026

[← Kembali](#)
[Unduh](#)
[JSON](#)
[Bagikan](#)

2025

☐ Freeze judul kolom

Sektor NTN (2018=100)	Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) serta Perubahannya (2018=100), 2025														
	Indeks												Tahunan	Januari	Febru
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	123,08	124,18	125,03	125,43	125,08	125,36	125,90	126,99	127,21	127,07	127,91	129,46	126,06	0,72	0,
1.1. Penangkapan Perairan Umum	119,58	119,85	120,32	120,72	120,45	120,13	120,15	120,22	119,81	120,22	120,93	122,20	120,38	0,41	0,
1.2. Penangkapan Laut	123,13	124,21	125,08	125,47	125,16	125,58	126,17	127,32	127,48	127,33	128,21	129,74	126,24	0,69	0,
2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	119,64	119,63	120,83	121,37	121,10	121,21	121,87	121,98	122,02	121,94	121,89	122,93	121,37	0,21	-0
2.1. Konsumsi Rumah Tangga	123,13	122,78	124,77	125,82	125,30	125,59	126,56	126,63	126,62	126,51	126,36	128,05	125,68	0,14	-0,
2.1.1. Makanan, Minuman Dan Tembakau	128,96	128,77	130,36	131,14	130,24	130,67	132,04	132,15	132,04	131,75	131,43	133,90	131,12	1,30	-0
2.1.2. Pakailan Dan Alas Kaki	120,29	120,45	121,86	122,04	122,12	122,33	122,65	122,72	122,80	122,90	122,98	123,22	122,20	0,18	0
2.1.3. Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	96,72	92,21	103,50	110,66	110,69	110,71	110,80	110,88	110,89	110,90	110,91	111,06	107,49	-11,94	-4,
2.1.4. Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	118,07	118,26	118,64	118,81	118,97	119,10	119,25	119,37	119,52	119,67	119,85	119,96	119,12	0,24	0
2.1.5. Kesehatan	116,63	116,83	117,34	117,52	117,78	117,93	118,09	118,21	118,31	118,45	118,59	118,71	117,86	0,27	0
2.1.6. Transportasi	120,26	120,72	120,89	120,72	120,72	120,52	120,99	120,62	120,77	120,84	120,96	121,95	120,83	0,34	0,
2.1.7. Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	103,64	103,65	103,68	102,81	102,79	102,84	102,84	102,87	102,90	102,92	102,92	102,92	103,07	0,04	0
2.1.8. Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	115,19	115,27	115,56	115,78	115,98	116,24	116,98	117,20	117,32	117,37	117,39	117,47	116,48	0,21	0,
2.1.9. Pendidikan	104,54	104,59	104,60	104,60	104,60	104,54	104,76	104,94	104,95	104,96	104,96	104,96	104,75	0,06	0,
2.1.10. Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	114,45	114,60	114,88	115,04	115,26	115,38	115,61	115,80	116,00	116,16	116,32	116,46	115,50	0,23	0
2.1.11. Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	121,68	122,41	123,32	124,50	124,90	125,23	125,52	125,84	126,56	128,11	128,80	129,33	125,52	0,34	0,
2.2. Indeks BPPBM (Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal)	115,87	116,18	116,46	116,41	116,41	116,38	116,59	116,73	116,84	116,82	116,96	117,28	116,58	0,32	0,
2.2.1. Sewa Dan Pengeluaran Lainnya	112,50	112,68	113,17	113,42	113,50	113,64	113,88	114,03	114,11	114,23	114,38	114,56	113,68	0,45	0
2.2.2. Transportasi Dan Komunikasi	121,19	121,74	121,82	121,42	121,27	121,01	121,37	121,51	121,57	121,53	121,67	122,32	121,54	0,23	0,
2.2.3. Barang Modal	110,99	111,11	111,50	111,60	111,67	111,77	111,84	111,95	112,06	112,12	112,22	112,30	111,76	0,31	0
2.2.4. Upah Buruh	112,56	112,71	112,98	113,20	113,26	113,30	113,36	113,54	113,63	113,63	113,72	113,81	113,31	0,43	0
3. NILAI TUKAR NELAYAN	102,87	103,80	103,48	103,35	103,29	103,42	103,31	104,10	104,25	104,21	104,94	105,32	103,86	0,51	0
4. NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN	106,22	106,88	107,36	107,74	107,45	107,72	107,98	108,79	108,88	108,77	109,37	110,39	108,13	0,40	0,

Keterangan Data :

Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018=100

Sumber data: [Badan Pusat Statistik per 5 Januari 2026](#)

Data Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Nelayan

No.	Pendampingan Kelembagaan	Tautan Dokumen	
1.	Capacity Building	https://drive.google.com/file/d/1SIMxu-i30ot3CEG-Q7bHdVyh4u5sKprB/view?usp=drive_link	
2.	Coaching Clinic	https://drive.google.com/file/d/1AhwOPOe60COg-Q0MPIholRsDHnP82Oa2/view?usp=drive_link	
No.	Nama KDMP	Lokasi	Tautan Dokumen
1.	Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja	Kab. Bireuen, Prov. Aceh	01. Laporan Final Pendampingan https://drive.google.com/drive/folders/1-cKAG7sBRy20mhGU_VbMQ2cOekpJDnqd 02. Dokumen Perencanaan Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1E_HgyLitqdZesVzml2oJ0bYghwV7iWAO 03. Dokumen Operasional Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmla1Sjt-otbCA4Xyt_5JORj9YxbmIQ
2.	Koperasi Desa Merah Putih Warloka	Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur	01. Laporan Final Pendampingan https://drive.google.com/drive/folders/1F1yd94DuyY1pXLIZE6kbMMYbUEU72Uhe 02. Dokumen Perencanaan Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1-Koak9cQ2xML-av6DL51jUikjY_mywu 03. Dokumen Operasional Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1ezlljz3zkQQ4tQdDjPOcY9fogQjoDbyv
3.	Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya	Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara	01. Laporan Final Pendampingan https://drive.google.com/drive/folders/1ijcoKzdYetT-9hgbKEo8GCpWgQmOcfp5 02. Dokumen Perencanaan Usaha https://drive.google.com/drive/folders/17-Pm25EtGwU5iblmouWd6O2Twsdyk9Zu 03. Dokumen Operasional Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1qpGEZH1O1OHnw5ACaEuj-vAt5DwKpzl0
4.	Koperasi Desa Merah Putih Lateng	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur	01. Laporan Final Pendampingan https://drive.google.com/drive/folders/1nB17GBukwLchz0FWKfy2RFaeZl4a_bJM 02. Dokumen Perencanaan Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1hvOIk0WV9FzWBTUQm4N0I1YjZUCzNM7g 03. Dokumen Operasional Usaha https://drive.google.com/drive/folders/1iU2ZiVPNeh11ACFI4nzeLKKaWJ0lsjv